



**Melampaui Toleransi:
Sintesis Tematik Realitas Sosial Masyarakat Multikultural Gresik**

Moch. Bachrurrosyady Amrulloh
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: rosyady.edu@gmail.com

Ahmad Hanif Fahrudin
Universitas Islam Lamongan
Email: kanghanif88@unisla.ac.id

Tasya Amelya Putri
Sekolah Dasar Al Ibrah Gresik
Email: tasyaamely14@gmail.com

Izzatul Laily Al Fa'iq
Kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak Alam Yaa Bunayya Gresik
Email: izzalyfq942@gmail.com

Abstrak

Keberagaman masyarakat Indonesia sering dipahami melalui konsep toleransi yang bersifat normatif. Pendekatan ini belum sepenuhnya menggambarkan realitas sosial keberagaman yang dijalani masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan mengkaji realitas sosial masyarakat multikultural dengan menempatkan moderasi beragama sebagai praktik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sintesis tematik atas dua penelitian lapangan di Kabupaten Gresik, yaitu di Kelurahan Sukorame (Kampung Pancasila) dan Kelurahan Tlogopatut (Kampung Moderasi). Data dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama terbangun melalui keberagaman yang dinormalisasi dalam kehidupan sosial, penguatan ruang sosial informal, partisipasi lintas agama, serta peran aktor lokal dalam menjaga harmoni. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama di tingkat masyarakat berfungsi sebagai etos sosial yang dihidupi bersama.

Kata kunci: moderasi beragama; masyarakat multikultural; kerukunan sosial

Abstract

Indonesia's diversity is often understood through a normative concept of tolerance. This perspective does not fully capture how diversity is lived in everyday social life. This article examines multicultural social realities by viewing religious moderation as a social practice. Using a qualitative approach, the study applies thematic synthesis to two field studies conducted in Gresik Regency, namely Sukorame Village (Pancasila Village) and Tlogopatut Village (Moderation Village). The data were drawn from interviews and field observations. The findings show that

interreligious harmony is maintained through the normalization of diversity in daily life, the role of informal social spaces, interfaith participation, and the involvement of local actors. This study highlights that religious moderation at the community level functions as a shared social ethos.

Keywords: *religious moderation; multicultural society; social harmony*

Pendahuluan

Keberagaman merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat yang majemuk—baik dari sisi agama, etnis, maupun budaya—menjadi fakta historis sekaligus tantangan sosial yang terus dihadapi. Dalam konteks ini, keberagaman sering kali dipahami melalui pendekatan normatif yang menekankan konsep *toleransi* sebagai solusi utama dalam menjaga harmoni sosial. Namun, pemahaman toleransi yang bersifat normatif dan formal cenderung mereduksi kompleksitas realitas sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹

Wacana toleransi kerap ditempatkan sebagai sikap pasif: saling membiarkan, menahan diri, atau sekadar tidak saling mengganggu. Pendekatan semacam ini berisiko menempatkan relasi antarumat beragama dalam posisi yang rapuh, karena harmoni sosial bergantung pada kesadaran individual, bukan pada praktik sosial yang hidup dan berkelanjutan.² Oleh karena itu, diperlukan perspektif yang melampaui toleransi sebagai konsep normatif, menuju pemahaman keberagaman sebagai praktik sosial yang dihidupi secara kolektif dalam ruang-ruang keseharian masyarakat.

Sejumlah kajian tentang multikulturalisme dan moderasi beragama menunjukkan bahwa kerukunan sosial yang bertahan lama tidak semata-mata dibangun melalui regulasi formal atau kampanye ideologis, melainkan melalui interaksi sosial yang cair, kebiasaan hidup bersama, serta nilai-nilai lokal yang diwariskan lintas generasi.³ Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya “menoleransi” perbedaan, tetapi mengintegrasikannya ke dalam pola relasi sosial yang bersifat alamiah. Keberagaman tidak lagi diposisikan sebagai potensi konflik, melainkan sebagai bagian dari identitas sosial bersama.

Artikel ini berangkat dari realitas tersebut dengan menyoroti praktik kehidupan masyarakat multikultural di tingkat lokal. Secara khusus, tulisan ini merujuk pada dua lokus penelitian di Kabupaten Gresik, yakni Kelurahan Sukorame yang dikenal sebagai Kampung Pancasila dan Kelurahan Tlogopatut yang ditetapkan sebagai Kampung Moderasi. Kedua wilayah ini merepresentasikan komunitas masyarakat yang hidup dalam struktur keberagaman agama dan budaya, namun mampu mempertahankan harmoni sosial secara berkelanjutan melalui praktik sosial sehari-hari.

Secara metodologis, artikel ini disusun melalui pendekatan kualitatif dengan strategi sintesis tematik atas temuan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, pola interaksi, dan praktik sosial masyarakat dari perspektif

¹ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 6–8.

² Ali Rattansi, *Multiculturalism: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 21–23.

³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15–18.

partisipan secara mendalam.⁴ Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang, menautkan relasi antar-tema, serta menarik makna konseptual dari realitas sosial yang diamati.⁵ Selain itu, karakter etnografis dalam pembacaan data digunakan untuk menangkap pola budaya, kebiasaan sosial, dan sistem makna yang hidup dalam komunitas masyarakat multikultural.⁶

Berangkat dari kerangka metodologis tersebut, artikel ini tidak dimaksudkan sebagai laporan hasil penelitian tunggal, melainkan sebagai rekonstruksi analitis yang mengintegrasikan berbagai temuan lapangan ke dalam pembacaan tematik. Pendekatan ini memungkinkan realitas sosial masyarakat multikultural dipahami secara holistik, sekaligus menampilkan bagaimana kerukunan antarumat beragama melampaui batas toleransi normatif dan hadir sebagai praktik sosial yang dihidupi.

Tujuan utama artikel ini adalah mengungkap bagaimana keberagaman dijalani sebagai pengalaman sosial bersama, bukan sekadar dikelola melalui wacana atau kebijakan formal. Dengan menempatkan pengalaman sosial warga sebagai titik tolak analisis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian moderasi beragama dan multikulturalisme, sekaligus menawarkan perspektif empiris berbasis komunitas lokal yang relevan bagi pengembangan pendidikan sosial dan kebijakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Keberagaman Sebagai Realitas Sosial yang Dihidupi

Hasil penelitian di dua kelurahan di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa keberagaman tidak dipahami oleh masyarakat sebagai konsep normatif yang abstrak, melainkan sebagai realitas sosial yang dijalani secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Temuan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga memperlihatkan bahwa relasi antarumat beragama tidak dibangun melalui kesepakatan formal atau dialog ideologis, tetapi melalui kebiasaan sosial yang telah mengakar lama dalam kehidupan kampung.⁷

Di Kelurahan Sukorame, keberagaman agama tidak dipersepsikan sebagai faktor pembeda yang memengaruhi relasi sosial. Informan penelitian menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam kegiatan kemasyarakatan—seperti kerja bakti, pertemuan RT/RW, dan kegiatan sosial lainnya—tidak pernah dibedakan berdasarkan latar belakang keyakinan. Pola ini menunjukkan bahwa keberagaman telah dinormalisasi sebagai bagian dari struktur sosial, bukan sebagai isu yang terus-menerus dinegosiasikan.⁸

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Parekh yang menyatakan bahwa masyarakat multikultural yang matang tidak lagi memperlakukan perbedaan sebagai persoalan moral yang harus diselesaikan, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang diterima secara kolektif. Dalam konteks ini, keberagaman tidak “ditoleransi dari kejauhan”, tetapi diintegrasikan ke dalam relasi sosial yang hidup.⁹

⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 42–44.

⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 86–90.

⁶ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), 5–8.

⁷ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Sukorame (Kampung Pancasila), Gresik, 12 Februari 2025.

⁸ Wawancara, warga Kelurahan Sukorame, Gresik, 14 Februari 2025.

⁹ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*: 162–165.

Realitas serupa juga ditemukan di Kelurahan Tlogopatut. Wawancara dengan tokoh agama dan warga lintas iman menunjukkan bahwa interaksi sosial antarumat beragama berlangsung secara cair dalam ruang-ruang keseharian, tanpa beban simbolik atau ekspresi ideologis yang berlebihan. Informan menyebutkan bahwa hubungan antarwarga lebih ditentukan oleh kedekatan sosial sebagai sesama warga kampung daripada oleh identitas keagamaan.¹⁰ Hal ini menandakan bahwa identitas agama tetap diakui, tetapi tidak dijadikan sebagai dasar eksklusivitas sosial.

Dalam perspektif teori multikulturalisme, praktik semacam ini mencerminkan bentuk *everyday multiculturalism*, yaitu keberagaman yang dihidupi melalui interaksi rutin dan relasi sosial yang bersifat praktis. Rattansi menegaskan bahwa pendekatan keseharian semacam ini justru lebih efektif dalam membangun kohesi sosial dibandingkan model toleransi normatif yang cenderung elitis dan berjarak dari pengalaman warga.¹¹

Lebih jauh, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa warga tidak merasa sedang “mentoleransi” pihak lain. Relasi sosial yang terbangun lebih didasarkan pada rasa saling percaya, kebiasaan hidup bersama, dan kepentingan kolektif sebagai warga kampung. Temuan ini menguatkan kritik terhadap konsep toleransi pasif yang hanya menekankan sikap menahan diri, tanpa membangun keterikatan sosial yang mendalam.¹² Dalam realitas di dua lokus penelitian, kerukunan justru tumbuh dari praktik hidup bersama yang berulang dan membentuk etos sosial bersama.

Dengan demikian, diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberagaman di tingkat lokal tidak berhenti pada tataran toleransi normatif. Keberagaman hadir sebagai realitas sosial yang dihidupi, diinternalisasi, dan direproduksi melalui relasi keseharian masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kerukunan antarumat beragama lebih tepat dipahami sebagai hasil dari praktik sosial yang hidup, bukan sekadar produk wacana atau regulasi formal.

Ruang Sosial Informal sebagai Basis Kerukunan

Kerukunan antarumat beragama di dua lokus penelitian tidak terutama dibangun melalui forum dialog formal atau program institusional, melainkan melalui ruang-ruang sosial informal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat mengindikasikan bahwa interaksi lintas agama paling intens justru terjadi dalam konteks non-formal, seperti pertemuan spontan antarwarga, kerja bakti lingkungan, dan aktivitas sosial berbasis kampung.¹³

Di Kelurahan Sukorame, ruang-ruang sosial informal berfungsi sebagai medium utama perjumpaan antarwarga tanpa sekat identitas. Informan penelitian menyebutkan bahwa aktivitas seperti berkumpul di lingkungan sekitar rumah, saling membantu dalam kegiatan sosial, dan komunikasi sehari-hari antar tetangga berlangsung tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Dalam ruang semacam ini, relasi sosial terbangun secara alamiah, sehingga identitas keagamaan tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan kedekatan sosial.¹⁴

¹⁰ Wawancara, tokoh agama Kelurahan Tlogopatut, Gresik, 18 Januari 2025.

¹¹ Ali Rattansi, *Multiculturalism*: 47–49.

¹² Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 152–155.

¹³ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Sukorame, Gresik, 12 Februari 2025.

¹⁴ Wawancara, warga Kelurahan Sukorame, Gresik, 14 Februari 2025.

Temuan serupa juga terlihat di Kelurahan Tlogopatut. Wawancara dengan tokoh agama dan warga lintas iman menunjukkan bahwa warung, pos ronda, serta kegiatan kemasyarakatan tingkat RT dan RW menjadi ruang sosial yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang agama. Interaksi yang terjadi di ruang-ruang tersebut bersifat cair dan egaliter, tanpa simbolisasi ideologis yang menonjol. Warga lebih memosisikan diri sebagai sesama anggota komunitas kampung daripada sebagai representasi identitas keagamaan tertentu.¹⁵

Dalam perspektif sosiologi agama, ruang sosial informal memiliki peran strategis dalam membangun kohesi sosial karena memungkinkan terjadinya interaksi yang berulang dan setara. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk dan dipertahankan melalui proses interaksi sehari-hari yang terus direproduksi.¹⁶ Dalam konteks ini, kerukunan antarumat beragama tidak lahir dari kesepakatan normatif, melainkan dari pengalaman bersama yang terbangun melalui rutinitas sosial.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa ruang-ruang informal tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah konflik. Ketika relasi sosial telah terbangun secara dekat dan personal, potensi kesalahpahaman berbasis identitas dapat diredam melalui komunikasi langsung antarwarga. Pola ini memperlihatkan bahwa kerukunan sosial lebih stabil ketika ditopang oleh kedekatan sosial yang bersifat praksis, bukan sekadar oleh norma abstrak atau aturan formal.¹⁷

Diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa ruang sosial informal merupakan fondasi penting dalam merawat kerukunan masyarakat multikultural. Melalui ruang-ruang inilah keberagaman dihidupi secara konkret, interaksi lintas agama berlangsung secara natural, dan solidaritas sosial dibangun tanpa perlu legitimasi ideologis yang berlebihan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik moderasi beragama di tingkat lokal sangat bergantung pada kualitas relasi sosial keseharian yang terbangun di ruang-ruang informal masyarakat.

Partisipasi Lintas Agama dan Etos Kebersamaan

Partisipasi lintas agama merupakan elemen penting dalam pembentukan etos kebersamaan di masyarakat multikultural. Di dua lokus penelitian, keterlibatan warga dalam kegiatan sosial tidak dibatasi oleh perbedaan keyakinan, melainkan didasarkan pada identitas bersama sebagai warga kampung. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga mengindikasikan bahwa partisipasi sosial dipahami sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sebagai ruang afirmasi identitas agama tertentu.¹⁸

Di Kelurahan Sukorame, partisipasi lintas agama tampak dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan seperti kerja bakti, peringatan hari besar nasional, dan kegiatan sosial kampung. Informan penelitian menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam kegiatan tersebut berlangsung secara setara, tanpa pembedaan peran berdasarkan latar belakang agama. Pola ini menunjukkan bahwa kebersamaan tidak dibangun di atas asas toleransi pasif, melainkan melalui keterlibatan aktif dalam kepentingan sosial bersama.¹⁹

¹⁵ Wawancara, tokoh agama Kelurahan Tlogopatut, Gresik, 18 Januari 2025.

¹⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), 149–152.

¹⁷ Wawancara, warga Kelurahan Tlogopatut tentang relasi sosial antarwarga, Gresik, 20 Januari 2025.

¹⁸ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Sukorame, Gresik, 12 Februari 2025.

¹⁹ Wawancara, warga Kelurahan Sukorame tentang keterlibatan dalam kegiatan sosial kampung, Gresik, 14 Februari 2025.

Realitas yang sepadan juga ditemukan di Kelurahan Tlogopatut. Wawancara dengan tokoh agama dan warga lintas iman menunjukkan bahwa partisipasi bersama dalam kegiatan kampung telah menjadi kebiasaan sosial yang mapan. Kehadiran warga non-Muslim dalam kegiatan sosial mayoritas, maupun sebaliknya, dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak problematis. Partisipasi tersebut tidak bersifat simbolik, tetapi berkontribusi nyata dalam memperkuat solidaritas sosial antarwarga.²⁰

Dalam perspektif teori sosial, partisipasi kolektif semacam ini merupakan fondasi pembentukan kohesi sosial. Durkheim menegaskan bahwa solidaritas sosial tumbuh dari keterlibatan individu dalam aktivitas bersama yang memperkuat kesadaran kolektif.²¹ Dalam konteks masyarakat multikultural, partisipasi lintas agama berfungsi sebagai medium pembentukan solidaritas mekanik yang diperbarui dalam konteks modern, di mana perbedaan identitas tidak meniadakan rasa kebersamaan.

Lebih jauh, temuan lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi lintas agama melahirkan etos kebersamaan yang melampaui sekat identitas formal. Warga tidak memosisikan diri sebagai representasi kelompok agama tertentu, melainkan sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab bersama. Etos kebersamaan ini membentuk rasa saling percaya dan memperkuat ikatan sosial, sehingga potensi konflik berbasis identitas dapat diminimalkan secara alami.²²

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi lintas agama bukan sekadar indikator kerukunan, tetapi merupakan mekanisme sosial yang aktif dalam merawat harmoni masyarakat multikultural. Melalui keterlibatan bersama dalam ruang sosial, keberagaman tidak hanya diterima, tetapi diolah menjadi kekuatan kolektif yang menopang kehidupan sosial secara berkelanjutan.

Melampaui Toleransi: Moderasi sebagai Praktik Sosial

Temuan penelitian di dua kelurahan menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama tidak berhenti pada sikap toleransi dalam pengertian normatif, melainkan berkembang menjadi praktik sosial yang dihidupi secara kolektif. Wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat mengindikasikan bahwa warga tidak memahami relasi lintas agama sebagai tindakan “memberi ruang” atau “menahan diri”, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang sudah seharusnya dijalani bersama. Dalam konteks ini, toleransi bukan lagi tujuan akhir, melainkan titik awal yang kemudian melahirkan pola hidup bersama yang lebih substantif.²³

Di Kelurahan Sukorame, praktik moderasi beragama tampak dalam cara warga memosisikan perbedaan sebagai realitas sosial yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Informan penelitian menegaskan bahwa keberagaman agama tidak pernah dijadikan bahan perbincangan yang problematik dalam relasi sosial sehari-hari. Perbedaan keyakinan diterima sebagai sesuatu yang “sudah ada sejak lama” dan karena itu tidak membutuhkan justifikasi ideologis atau penegasan simbolik.²⁴ Realitas ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bekerja pada level praksis, bukan pada level wacana formal.

²⁰ Wawancara, tokoh agama Kelurahan Tlogopatut, Gresik, 18 Januari 2025.

²¹ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 70–73.

²² Wawancara, warga Kelurahan Tlogopatut tentang partisipasi lintas agama dalam kegiatan kampung, Gresik, 20 Januari 2025.

²³ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Sukorame, Gresik, 12 Februari 2025.

²⁴ Wawancara, warga Kelurahan Sukorame tentang persepsi keberagaman agama, Gresik, 14 Februari 2025.

Sementara itu, di Kelurahan Tlogopatut, wawancara dengan tokoh agama memperlihatkan bahwa moderasi beragama dipahami sebagai sikap hidup yang menekankan keseimbangan antara komitmen keagamaan dan tanggung jawab sosial. Informan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga tanpa harus mencampuradukkan keyakinan. Prinsip ini tidak diwujudkan melalui larangan atau regulasi ketat, melainkan melalui teladan sosial dan komunikasi yang bijaksana.²⁵ Moderasi dalam konteks ini berfungsi sebagai etika sosial yang mengatur cara warga hadir di ruang publik secara inklusif.

Jika dibaca melalui perspektif teori moderasi beragama, temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa moderasi tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif atau kebijakan negara, tetapi harus dilihat sebagai praktik sosial yang kontekstual. Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa moderasi beragama sejatinya adalah cara beragama yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.²⁶ Dalam realitas di dua lokus penelitian, prinsip tersebut tidak diajarkan secara doktrinal, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman hidup bersama.

Lebih jauh, praktik moderasi yang ditemukan di lapangan juga sejalan dengan konsep *lived religion*, yang menekankan bahwa keberagamaan masyarakat lebih banyak diekspresikan melalui tindakan sosial daripada melalui pernyataan teologis. Dalam konteks ini, moderasi tidak hadir sebagai slogan atau program, tetapi sebagai kebiasaan sosial yang membentuk pola relasi antarwarga. Praktik saling menghormati, keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial, serta kemampuan menahan diri dari ekspresi keagamaan yang eksklusif di ruang publik menjadi wujud konkret moderasi yang hidup.²⁷

Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa warga tidak merasa perlu mendefinisikan diri mereka sebagai “masyarakat moderat”. Moderasi justru bekerja secara diam-diam (*taken for granted*), tertanam dalam etos kebersamaan dan rasa saling percaya. Pola ini menguatkan kritik terhadap pendekatan toleransi pasif yang hanya menekankan penghindaran konflik. Dalam realitas sosial yang dihidupi, moderasi beragama justru bersifat aktif: ia menuntut keterlibatan, empati sosial, dan kesediaan berbagi ruang hidup dengan pihak lain.²⁸

Dengan demikian, diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa melampaui toleransi berarti memindahkan fokus dari sikap individual menuju praktik sosial kolektif. Moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menerima perbedaan, tetapi sebagai proses sosial yang terus-menerus direproduksi melalui relasi keseharian. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kerukunan yang berkelanjutan hanya mungkin terwujud ketika moderasi beragama menjadi bagian dari struktur sosial dan budaya masyarakat, bukan sekadar wacana normatif atau agenda institusional.

Peran Aktor Lokal dalam Merawat Harmoni Sosial

Keberlanjutan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural sangat ditentukan oleh peran aktor lokal yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan relasi sosial. Di dua lokus penelitian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur tingkat lokal tidak tampil sebagai pengendali

²⁵ Wawancara, tokoh agama Kelurahan Tlogopatut, Gresik, 18 Januari 2025.

²⁶ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* 43–45.

²⁷ Meredith B. McGuire, *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 12–15.

²⁸ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*: 172–175.

otoritatif, melainkan sebagai figur teladan yang memandu cara warga bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dengan informan mengindikasikan bahwa keberadaan aktor lokal tersebut menjadi rujukan moral dan sosial dalam merespons perbedaan.²⁹

Di Kelurahan Sukorame, tokoh masyarakat berperan penting dalam menjaga iklim sosial yang inklusif melalui pendekatan persuasif dan keteladanan. Informan penelitian menegaskan bahwa para tokoh tidak pernah mengedepankan narasi perbedaan agama dalam forum-forum kemasyarakatan, tetapi lebih menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepentingan bersama sebagai warga kampung. Peran ini tidak dijalankan melalui instruksi formal, melainkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari yang secara tidak langsung ditiru oleh warga.³⁰

Peran serupa juga ditemukan di Kelurahan Tlogopatut. Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa mereka secara sadar menjaga bahasa dan sikap agar tidak memicu eksklusivisme keagamaan di ruang publik. Tokoh agama memosisikan diri sebagai penjaga harmoni sosial dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga, tanpa mengaburkan komitmen keagamaan masing-masing. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan keagamaan di tingkat lokal berfungsi lebih sebagai pengarah etika sosial daripada sebagai otoritas doktrinal.³¹

Dalam perspektif teori kepemimpinan sosial, peran aktor lokal semacam ini sejalan dengan konsep *informal leadership*, di mana pengaruh sosial tidak bersumber dari jabatan struktural, tetapi dari legitimasi moral dan kedekatan sosial. Gramsci menyebut figur semacam ini sebagai *organic intellectuals* yang bekerja dalam ruang keseharian masyarakat dan berperan membentuk kesadaran kolektif.³² Dalam konteks masyarakat multikultural, aktor lokal berfungsi sebagai penafsir nilai-nilai keagamaan dan sosial agar tetap relevan dengan realitas hidup bersama.

Lebih jauh, temuan wawancara menunjukkan bahwa aktor lokal juga berperan sebagai mediator sosial ketika muncul potensi gesekan antarwarga. Kedekatan personal yang terbangun antara tokoh masyarakat dan warga memungkinkan penyelesaian persoalan dilakukan secara dialogis dan non-konfrontatif. Pola ini memperlihatkan bahwa harmoni sosial tidak dijaga melalui mekanisme hukum formal semata, tetapi melalui relasi sosial yang dilandasi kepercayaan dan komunikasi yang intens.³³

Penelitian ini menegaskan bahwa peran aktor lokal merupakan elemen kunci dalam merawat harmoni sosial masyarakat multikultural. Keberhasilan menjaga kerukunan tidak terletak pada kekuatan regulasi atau program formal, melainkan pada kemampuan aktor lokal menghidupkan nilai-nilai kebersamaan melalui keteladanan, komunikasi, dan kedekatan sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa moderasi beragama di tingkat lokal sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan sosial yang berakar pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

²⁹ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Sukorame, Gresik, 12 Februari 2025.

³⁰ Wawancara, warga Kelurahan Sukorame tentang peran tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial, Gresik, 14 Februari 2025.

³¹ Wawancara, tokoh agama Kelurahan Tlogopatut, Gresik, 18 Januari 2025.

³² Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (New York: International Publishers, 1971), 9–12.

³³ Wawancara, tokoh masyarakat Kelurahan Tlogopatut tentang penyelesaian persoalan sosial warga, Gresik, 20 Januari 2025.

Penutup

Berdasarkan sintesis tematik atas temuan penelitian di dua kelurahan di Kabupaten Gresik, artikel ini menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama tidak dapat direduksi semata-mata pada konsep toleransi normatif. Realitas sosial yang ditemukan menunjukkan bahwa keberagaman justru dihidupi sebagai praktik sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kerukunan tidak hadir sebagai hasil dari kesepakatan formal atau regulasi institusional, melainkan tumbuh dari relasi sosial yang cair, partisipasi kolektif, serta etos kebersamaan yang dibangun secara berkelanjutan.

Temuan pada subbagian sebelumnya memperlihatkan bahwa keberagaman menjadi stabil ketika ia dinormalisasi dalam struktur sosial masyarakat. Ruang-ruang sosial informal berfungsi sebagai medium utama pembentukan relasi lintas agama, sementara partisipasi sosial lintas identitas melahirkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak dipraktikkan sebagai slogan atau agenda ideologis, tetapi sebagai etika sosial yang mengatur cara warga hadir, berinteraksi, dan berbagi ruang hidup secara adil dan seimbang.

Lebih jauh, peran aktor lokal terbukti menjadi faktor kunci dalam merawat harmoni sosial. Tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak berfungsi sebagai otoritas yang mengontrol perilaku warga secara formal, melainkan sebagai figur teladan yang menafsirkan nilai-nilai keagamaan dan sosial secara kontekstual. Melalui keteladanan, komunikasi persuasif, dan kedekatan sosial, aktor lokal berkontribusi dalam membentuk ekosistem moderasi yang hidup dan berakar pada budaya masyarakat setempat.

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian moderasi beragama dan multikulturalisme dengan menekankan pentingnya perspektif praksis. Moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif atau kebijakan negara, tetapi perlu dibaca sebagai praktik sosial yang tumbuh dari pengalaman hidup bersama. Temuan ini memperkuat pendekatan *lived religion* dan *everyday multiculturalism* yang menempatkan kehidupan keseharian masyarakat sebagai locus utama pembentukan harmoni sosial.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi bagi perumusan kebijakan kerukunan umat beragama dan pengembangan pendidikan sosial keagamaan. Upaya merawat kerukunan di tingkat lokal seharusnya tidak hanya berfokus pada program formal dan deklarasi simbolik, tetapi juga pada penguatan ruang-ruang sosial informal, partisipasi warga, serta peran aktor lokal sebagai penjaga harmoni. Pendekatan berbasis komunitas ini lebih adaptif dan berkelanjutan karena berangkat dari realitas sosial yang telah hidup dalam masyarakat.

Akhirnya, artikel ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengkaji lebih jauh dinamika moderasi beragama di tingkat komunitas dengan pendekatan lintas disiplin dan lokus yang lebih beragam. Dengan demikian, pemahaman tentang kerukunan dan keberagaman tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terus berkembang sebagai praktik sosial yang kontekstual dan relevan dengan tantangan masyarakat multikultural kontemporer.

Referensi

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Translated by W. D. Halls. New York: Free Press, 1997.

Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.

Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

McGuire, Meredith B. *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

Rattansi, Ali. *Multiculturalism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.

Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.